

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Tambang

Edisi : 10 Januari 2012
Halaman : 13

PERTAMBANGAN

Warga Khawatir Terjadi Banjir Lagi

Jakarta, Kompas - Warga di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, pada musim hujan ini khawatir terjadi bencana banjir serupa yang terjadi beberapa kali pada tahun 2011. Banjir saat itu diduga kuat disebabkan aktivitas pertambangan di hulu Sungai Bahongkolangu, yang membuat air meluap dan menggenangi permukiman setempat.

Hal itu dikemukakan W Etal dari Divisi Pengembangan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Senin (9/1), yang dihubungi di Palu.

Etal mengatakan, saat ini beroperasi pengerukan bijih nikel oleh PT BDM. Bijih nikel dikirim langsung ke China menggunakan kapal-kapal tongkang.

Perusahaan itu beroperasi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, terutama di daerah hulu sungai. Aktivitas perusahaan menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah dan ternak serta sawah dan ladang warga Desa Bahodopi, Keurea, Fatupia, Trans Makarti, dan Bahomakmur. Banjir juga meruntuhkan jembatan.

Etal memaparkan, berbekal izin usaha pertambangan (IUP) dari Bupati Morowali tahun 2010, wilayah pertambangan PT BDM mencakup sembilan desa di Bahodopi. Operasional perusahaan itu berlangsung sejak tahun 2010 hingga tahun 2025.

Aktivitas perusahaan yang merugikan lingkungan dan menyebabkan bencana banjir telah berulang kali diprotes warga. Pada Agustus 2010, Polres Morowali menangkap 32 warga saat protes berlangsung dengan alasan merusak fasilitas perusahaan tambang.

Galang dukungan

Saat ini, Jatam Sulteng menggalang kampanye dan menghasilkan dukungan 25.000 orang dari luar negeri (Belanda, Jerman, Spanyol, Luksemburg, Amerika Serikat, Belgia, Perancis, Inggris, Austria, Swiss, Italia, dan Meksiko). Selain itu, ada dukungan 30 organisasi masyarakat.

"Surat-surat dukungan sedang kami persiapkan untuk dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan penambangan nikel di Bahodopi," kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Mereka juga mendesak agar Presiden memerintahkan perusahaan memperbaiki kondisi lingkungan setempat yang hancur akibat eksploitasi pertambangan, terutama pemulihan kondisi hutan damar yang menjadi mata pencarian masyarakat sekitar.

Pius mengatakan, dikeluarkannya IUP oleh Bupati Morowali sama dengan tindakan Bupati Bima mengeluarkan IUP untuk perusahaan tambang PT SMN yang diprotes warga hingga jatuh korban jiwa, beberapa waktu lalu.

"Ini menunjukkan, syarat persetujuan warga bilamana ruang hidup mereka dijadikan kawasan tambang adalah mutlak. Syarat persetujuan warga secara semu diakui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," katanya.

Walhi telah mengajukan uji materi UU Pertambangan Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi pada April 2010 untuk memperkuat klausul syarat persetujuan warga jika ruang hidup mereka dijadikan kawasan tambang. Namun, sampai kini belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait hal itu. (ICH)